



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S2 Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah	7410802030	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=4.48	2	1 Desember 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi	
		Bachrul Amiq			Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	

Model Pembelajaran	Case Study
---------------------------	------------

Capaian Pembelajaran (CP) CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori dan filsafat hukum
CPL-6	Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum
CPL-8	Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya
CPL-10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dengan mengkaji perkembangan ilmu hukum serta penerapannya di masyarakat
CPL-11	Mampu bertanggungjawab atas putusan dan hasil kerja dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengevaluasinya
CPL-12	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori;
CPL-13	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
CPL-14	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum keolahragaan dan hukum secara umum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis, konsep dan peraturan perundang-undangan;
CPL-18	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK - 1	Pemahaman Dasar Pemerintahan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pemecahan Masalah Praktis
CPMK - 2	Analisis Peraturan Perundang-undangan
CPMK - 3	Pengelolaan Keuangan Daerah
CPMK - 4	Akuntabilitas dan Transparansi
CPMK - 5	Pemecahan Masalah Praktis

Matrik CPL - CPMK

	CPMK	CPL-5	CPL-6	CPL-8	CPL-10	CPL-11	CPL-12	CPL-13	CPL-14	CPL-18
CPMK-1			✓	✓			✓	✓		
CPMK-2			✓	✓			✓	✓	✓	
CPMK-3			✓	✓			✓	✓	✓	
CPMK-4			✓	✓			✓			
CPMK-5							✓	✓	✓	

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

--	--

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
		(3)	(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pemerintahan daerah	Kemampuan Mahasiswa menganalisis konsep dasar pemerintahan daerah	Kriteria: Ketajaman analisis konsep dasar pemerintahan daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Ceramah, diskusi dan Tanya jawab 50		Materi: Konsep dasar pemerintahan daerah Pustaka: 1. Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika. Materi: Konsep dasar pemerintahan daerah Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.	5%

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✓	✓						✓	✓	✓						
CPMK-2																
CPMK-3																
CPMK-4																
CPMK-5																

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan good governance, kelembagaan daerah, pemilihan kepala daerah, dan keuangan daerah.
Pustaka	Utama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika. 2. Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 3. Bagir Manan. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum – FH UII. 4. B.N. Marbun. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 5. Edi Toet Hendratno. 2009. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Yogyakarta : Graha Ilmu. 6. Hanif Nurcholih. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 7. Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim. 8. Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : UIII Press. 9. Sadu Wasistiono, dkk. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoretik, dan Implementatif. Bandung : Fokusmedia. 10. Sony Yuwono, dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang : Bayumedia. Pendukung :
Dosen Pengampu	Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.

2	Mahasiswa mampu menganalisis landasan yuridis, konsep otonomi daerah dan otonomi desa, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa	Kemampuan mahasiswa menganalisis pengertian otonomi daerah	Kriteria: Ketajaman analisis tentang pengertian otonomi daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Mahasiswa mampu menganalisis pengertian otonomi daerah 50		Materi: Otonomi daerah, sistem otonomi daerah Pustaka: 2. Agus Dwiyanto. 2005. <i>Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik</i> . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Materi: Otonomi daerah Pustaka: 6. Hanif Nurcholis. 2005. <i>Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i> . Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.	5%
3	Kemampuan mahasiswa menganalisis sistem otonomi daerah	Kemampuan Mahasiswa menganalisis sistem otonomi daerah	Kriteria: Ketepatan analisis tentang sistem otonomi daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah, diskusi, Tanya jawab 50		Materi: Sistem Otonomi Daerah Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. <i>DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004</i> . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Materi: Sistem Otonomi Daerah Pustaka: 5. Edi Toet Hendratno. 2009. <i>Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme</i> . Yogyakarta : Graha Ilmu.	5%
4	Mahasiswa dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah	Kemampuan Mahasiswa untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah	Kriteria: Ketepatan evaluasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi, ceramah dan Tanya jawab 50		Materi: Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah Pustaka: 6. Hanif Nurcholis. 2005. <i>Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i> . Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.	5%

5	Mahasiswa mampu mengevaluasi penyelenggaraan good governance dalam rangka otonomi daerah	Kemampuan Mahasiswa untuk mengevaluasi penyelenggaraan good governance dalam rangka otonomi daerah	<p>Kriteria: Ketepatan evaluasi tentang penyelenggaraan good governance dalam rangka otonomi daerah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab 50		<p>Materi: Good Governance Pustaka: 2. Agus Dwiyanto. 2005. <i>Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik</i>. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.</p> <p>Materi: Good governance dalam rangka otonomi daerah Pustaka: 3. Bagir Manan. 2002. <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum – FH UII.</p>	5%
6	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengkreasi cara-cara pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah	Kemampuan Mahasiswa menganalisis dan mengkreasi cara-cara pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah	<p>Kriteria: Ketajaman dan kreativitas cara-cara pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah, Brainstorming dan diskusi 50		<p>Materi: Cara-cara pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah, kewenangan pemerintahan Pustaka: 5. Edi Toet Hendratno. 2009. <i>Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme</i>. Yogyakarta : Graha Ilmu.</p> <p>Materi: Cara-cara pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah Pustaka: 6. Hanif Nurcholli. 2005. <i>Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i>. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.</p>	5%
7	Mahasiswa mampu mengevaluasi kewenangan pemerintahan	Kemampuan Mahasiswa untuk mengevaluasi kewenangan pemerintahan	<p>Kriteria: Ketepatan evaluasi kewenangan pemerintahan</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Diskusi dan ceramah		<p>Materi: Kewenangan pemerintahan Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. <i>DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004</i>. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.</p> <p>Materi: Kewenangan pemerintahan Pustaka: 5. Edi Toet Hendratno. 2009. <i>Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme</i>. Yogyakarta : Graha Ilmu.</p>	5%
8		Kemampuan	Kriteria:			Materi: -	10%

Ujian Tengah Semester

menjawab semua soal UTS

Kebenaran jawaban semua soal UTS

Bentuk Penilaian :
Praktik / Unjuk Kerja,
Tes

Pustaka: 1. Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Materi: -

Pustaka: 2. Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Materi: -

Pustaka: 3. Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum – FH UII.

Materi: -

Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Materi: -

Pustaka: 5. Edi Toet Hendratno. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Materi: -

Pustaka: 6. Hanif Nurcholli. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Materi: -

Pustaka: 7. Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid

Hasyim.

Materi: -

Pustaka: 8.
Muhammad
Fauzan. 2006.
Hukum
Pemerintahan
Daerah Kajian
Tentang
Hubungan
Keuangan antara
Pusat dan
Daerah.
Yogyakarta : UIII
Press.

Materi: -

Pustaka: 8.
Muhammad
Fauzan. 2006.
Hukum
Pemerintahan
Daerah Kajian
Tentang
Hubungan
Keuangan antara
Pusat dan
Daerah.
Yogyakarta : UIII
Press.

Materi: -

Pustaka: 9. Sadu
Wasistiono, dkk.
2006. Memahami
Asas Tugas
Pembantuan
Pandangan
Legalistik,
Teoretik, dan
Implementatif.
Bandung :
Fokusmedia.

Materi: -

Pustaka: 10.
Sony Yuwono,
dkk. 2008.
Memahami APBD
dan
Permasalahannya
(Panduan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah). Malang :
Bayumedia.

9	Mahasiswa mampu menganalisis susunan pemerintahan daerah	Kemampuan Mahasiswa untuk menganalisis susunan pemerintahan daerah	Kriteria: Ketepatan analisis tentang Menjelaskan susunan pemerintahan daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan pendampingan		Materi: Susunan pemerintahan daerah Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Materi: Susunan pemerintahan daerah Pustaka: 7. Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim.	5%
10	Mahasiswa mampu mengevaluasi penghapusan dan penggabungan pemerintah daerah dan pemerintah desa serta pembentukan kawasan khusus	Kemampuan Mahasiswa untuk mengevaluasi hubungan masing -masing lembaga daerah	Kriteria: Ketepatan evaluasi tentang hubungan masing -masing lembaga daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi dan Tanya jawab 50		Materi: Hubungan masing -masing lembaga daerah Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.	5%
11	Mahasiswa mampu mengevaluasi kedudukan, fungsi lembaga daerah	Kemampuan Mahasiswa untuk mengevaluasi kedudukan, fungsi lembaga daerah	Kriteria: Ketepatan evaluasi berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga daerah Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi dan pendampingan 50		Materi: Kedudukan dan Fungsi Lembaga Daerah Pustaka: 1. Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika. Materi: Kedudukan dan Fungsi Lembaga Daerah Pustaka: 6. Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.	5%

12	Mahasiswa mampu mengevaluasi tugas, wewenang, lembaga daerah	Kemampuan Mahasiswa mengevaluasi tugas dan wewenang lembaga daerah	<p>Kriteria: Ketepatan evaluasi tentang tugas dan wewenang lembaga daerah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Diskusi dan ceramah 50		<p>Materi: Tugas dan wewenang Lembaga Daerah Pustaka: 3. <i>Bagir Manan. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum – FH UII.</i></p> <p>Materi: Tugas dan wewenang Lembaga Daerah Pustaka: 5. <i>Edi Toet Hendratno. 2009. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Yogyakarta : Graha Ilmu.</i></p>	5%
13	Mahasiswa mampu menganalisis hak, kewajiban lembaga daerah	Kemampuan Mahasiswa menganalisis hak, kewajiban lembaga daerah	<p>Kriteria: Ketajaman analisis tentang tugas dan wewenang lembaga daerah</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Diskusi dan ceramah 50		<p>Materi: Tugas dan wewenang lembaga daerah Pustaka: 2. <i>Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.</i></p> <p>Materi: Tugas dan wewenang lembaga daerah Pustaka: 4. <i>B.N. Marbun. 2005. DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.</i></p>	5%
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia	Kemampuan Mahasiswa mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia	<p>Kriteria: Ketepatan evaluasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi dan Tanya jawab 50		<p>Materi: Pemilihan Kepala Daerah Pustaka: 7. <i>Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim.</i></p>	10%

15	Mahasiswa mampu menganalisis Keuangan Daerah	Kemampuan Mahasiswa untuk menganalisis Keuangan Daerah	Kriteria: Ketajaman analisis berkaitan dengan Keuangan Daerah Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi dan pendampingan 50		Materi: Keuangan Daerah Pustaka: 8. <i>Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : UIII Press.</i> <hr/> Materi: Keuangan Daerah Pustaka: 10. <i>Sony Yuwono, dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang : Bayumedia.</i>	5%
16	Mahasiswa mampu mengerjakan soal-soal UAS	Kemampuan Mahasiswa menjawab soal-soal UAS	Kriteria: Ketepatan dalam menjawab soal-soal UAS Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja, Tes	tes		Materi: - Pustaka: 1. <i>Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.</i> <hr/> Materi: - Pustaka: 2. Agus Dwiyanto. 2005. <i>Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.</i> Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. <hr/> Materi: - Pustaka: 3. Bagir Manan. 2002. <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.</i> Yogyakarta : Pusat Studi Hukum – FH UII. <hr/> Materi: - Pustaka: 4. B.N. Marbun. 2005. <i>DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004.</i> Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. <hr/> Materi: - Pustaka: 5. Edi Toet Hendratno. 2009. <i>Negara Kesatuan,</i>	15%

						<p>Desentralisasi, dan Federalisme. Yogyakarta : Graha Ilmu.</p> <p>Materi: - Pustaka: 6. Hanif Nurcholis. 2005. <i>Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.</i> Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.</p> <p>Materi: - Pustaka: 7. Joko J. Prihatmoko. 2005. <i>Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia.</i> Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim.</p> <p>Materi: - Pustaka: 8. Muhammad Fauzan. 2006. <i>Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.</i> Yogyakarta : UIII Press.</p> <p>Materi: - Pustaka: 9. Sadu Wasistiono, dkk. 2006. <i>Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoretik, dan Implementatif.</i> Bandung : Fokusmedia.</p> <p>Materi: - Pustaka: 10. Sony Yuwono, dkk. 2008. <i>Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah).</i> Malang : Bayumedia.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	45.84%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	1.67%
3.	Penilaian Portofolio	4.17%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	35.84%

5.	Tes	12.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.